

## TEMUAN KOMNAS HAM

Pengusutan kasus Penyerangan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, telah memasuki hari ke-624, kemarin. Selama itu, tak ada satu pun pelaku yang tertangkap. Rina Emilda, istri Novel, melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ihwal penanganan kasus di kepolisian yang tak kunjung membuahkan hasil. Berikut ini temuannya.

### Temuan

- Penyerangan Novel diduga sebagai tindakan yang direncanakan dan sistematis yang melibatkan beberapa pihak yang masih belum terungkap.
- Tindakan itu diduga melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai perencana, pengintai, dan pelaku kekerasan.
- Dalam peristiwa kekerasan yang dialami Novel Baswedan terdapat bukti permulaan cukup, diduga terjadi pelanggaran hak atas rasa aman, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, dan hak atas perlindungan HAM serta kebebasan dasar tanpa diskriminasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan undang-undang.
- Sampai saat ini kejahatan yang dialami belum terungkap, belum ada satu pun pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. \*
- Komnas HAM menyimpulkan bahwa Tim Polda bekerja terlalu lama.
- Lamanya proses pengungkapan diduga akibat kompleksitas permasalahan. Namun timbul pertanyaan, apakah telah terjadi *abuse of process*.

# KOMNAS HAM BERKUKUH TGPF DIBENTUK OLEH KAPOLRI

Koran Tempo - 26/12/10

## Polisi dianggap gagal mengusut kasus penyerangan Novel Baswedan.



TEMPO / HILMAN FATURRAHMAN W

Konferensi pers mengenai kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, di Media Center Komnas HAM, Jakarta, Jumat lalu.

### Maya Ayu Puspitasari

[maya.puspitasari@tempo.co.id](mailto:maya.puspitasari@tempo.co.id)

**JAKARTA** — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ber-kukuh pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan harus dilakukan oleh Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, mengatakan polisi perlu terlibat karena saat ini kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan

Korupsi itu sudah masuk proses hukum pro yustisia. "Karena ini proses penyidikan, jadi ranahnya Kapolri. Tapi tetap kami minta tim gabungan sehingga Kapolri perlu didukung oleh anggota lain," kata Sandrayati kepada *Tempo*, kemarin.

Rekomendasi Komnas HAM agar Kapolri segera membentuk TGPF kasus Novel telah diserahkan pada Jumat pekan lalu. Dalam rekomendasi itu, Komnas menyarankan agar TGPF beranggotakan tokoh dan perwakilan masyarakat.

Pelibatan Kapolri dalam pembentukan tim gabungan ini bertujuan agar penanganan kasus lebih cepat dan efektif.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai pelibatan Kapolri dalam pembentukan TGPF tak perlu dikhawatirkan. Buktnya, TGPF aktivis HAM Munir dulunya dipimpin Brigadir Jenderal Polri Mashudi. TGPF itu menghasilkan berkas investigasi Munir, meski kini telah hilang.

Pelibatan polisi dalam

pembentukan TGPF mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, menyatakan pembentukan TGPF dilaksanakan karena institusi penegak hukum belum mampu atau mengalami kesulitan. "Sudah semestinya TGPF dibentuk oleh Presiden RI, dengan bersifat Independen," katanya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, juga mengungkap ketidakmampuan polisi dalam menangani kasus Novel. Menurut dia, ada indikasi penyalahgunaan proses penyidikan. Misalnya, observasi yang dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya tidak mampu memetakan saksi dan barang bukti penting. Selain itu, Asfinawati menyebut tim penyidik

Polda Metro Jaya minim pemeriksaan terhadap orang asing yang berada di sekitar lokasi penyerangan. Bahkan banyak rekaman CCTV yang memiliki spot signifikan tidak diperiksa. Asfinawati menuturkan, tim penyidik Polda Metro Jaya sebenarnya telah mendapatkan *call data record* (CDR), namun tidak berhasil mengungkap nomor dan materi komunikasi yang patut dicurigai. "Mereka tidak memanfaatkan laboratorium forensik," kata dia.

Juru bicara Presiden, Adita Irawati, menyatakan, jika pemerintah membentuk TGPF, hasil kerja tim nantinya bakal direalisasi oleh Kepolisian RI.

Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, mengatakan lembaganya masih bekerja untuk mengungkap kasus penyerangan Novel. Selama ini, ia mengklaim polisi sudah melibatkan banyak instansi, termasuk KPK, Komnas HAM, Ombudsman, dan Komisi Kepolisian Nasional. "Cepat atau lambatnya pengungkapan kasus itu bergantung pada alat bukti yang ditemukan di TKP. Kalau alat bukti yang ditemukan sangat minim, polisi akan terus menggali. Usulan Komnas HAM akan dikaji," katanya.

● MAYA AYU PUSPITASARI | VINDRY FLORENTIN | ADITA RAHMA

### 11 April 2017

Novel Baswedan diserang orang tak dikenal sepulang dari salat subuh di masjid dekat rumahnya.

### 26 Januari 2018

Rina Emilda, istri Novel, mengadu ke Komnas HAM perihal lambatnya proses penyelidikan penyerangan Novel.

### 6-7 Februari 2018

Sidang Paripurna Komnas HAM membentuk Tim Pemantauan-Proses Hukum kasus Novel.

### Awal Maret 2018

Tim mulai bekerja.

### 21 Desember 2018

Komnas HAM menyerahkan hasil temuan dan rekomendasi ke kepolisian dan KPK

### 6-7 November 2018

Tim memberikan laporan akhir dalam Sidang Paripurna Komnas HAM.

● MAYA AYU PUSPITASARI | SUMBER: KOMNAS HAM

